

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam hakikatnya setiap pemilihan umum bisa dikatakan memiliki peranan yang penting untuk di telaah dan di cermati. Momen pemilihan umum bisa disebut sebagai momen yang paling penting dan signifikan untuk menentukan arah kebijakan negara selama lima tahun mendatang. Fungsi dari pemilihan umum sendiri dapat dilihat sesuai dengan sila keempat yang terdapat dalam Pancasila, yaitu “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan”, hal ini menyatakan bahwa Indonesia adalah sebuah negara dimana pemerintahannya berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Hal ini menyebabkan setiap pemilihan umum yang diselenggarakan oleh pemerintah untuk masyarakat melakukan pemilihan umum dalam memilih presiden, dilakukan dan dipilih secara bersamaan atau umum, bebas dan rahasia. Sejak awal pertama pemilihan umum di tahun 1955, kampanye telah menjadi salah satu aspek yang menentukan kemenangan dalam pemilihan umum. Menurut Arianto (2015), kampanye yang dilaksanakan di era Orde Lama dan Orde Baru sebelumnya lebih banyak mengutarakan dan menggambarkan model kampanye seperti pawai bersama, apel akbar, pengerahan massa, arak-arakan dan juga pidato politik.

Kampanye pemilihan umum sendiri merupakan kegiatan peserta pemilihan umum atau pihak lain yang sebelumnya sudah ditunjuk oleh peserta pemilihan umum untuk dapat meyakinkan masyarakat atau para pemilihnya dengan cara menawarkan dan menjelaskan sebuah visi misi citra diri pemilihan umum serta program yang akan dijalankan. Pada saat melakukan kegiatan kampanye pemilihan umum, terdapat beberapa metode yang dapat dilakukan dalam berkampanye, seperti pertemuan terbatas atau tertutup, pertemuan tatap muka atau terbuka, menyebarkan informasi kampanye pemilihan umum kepada masyarakat secara lisan maupun tertulis, pemasangan alat peraga kampanye di tempat umum, media sosial maupun iklan pada media cetak, media elektronik dan lainnya.

Kampanye politik yang terjadi saat pemilihan umum atau pemilihan umum khususnya pemilihan presiden 2024 dapat dikatakan sebagai kampanye politik dengan kontestasi yang cukup panjang, kreatif dan ketat. Arianto (2015) menuturkan bahwa dimulai dari pemilihan umum pada tahun 1997, di mana para partai politik dari setiap kontestan atau peserta pemilihan umum memulai kampanye politik melalui internet. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) merupakan partai pertama yang memulai kampanye politik di internet dengan meluncurkan sebuah situs bernama *www.ppp.or.id*. Diikuti pula dengan partai Golkar yang meluncurkan sebuah situs dengan nama *www.golkar.co.id* dan disusul oleh partai Demokrasi Indonesia yang akhirnya meluncurkan sebuah situs dengan nama *www.banteng.org*. Ketiga partai tersebut yang akhirnya menghadirkan beragam dinamika kampanye politik yang ada di Indonesia. Hal ini didukung Scammell (1998) yang menyatakan bahwa negara Amerika Serikat (AS)

merupakan negara yang memimpin sebuah perubahan gaya kampanye dengan cara-cara langsung, dengan cara mempekerjakan dan mencari sejumlah konsultan politik pada saat kampanye pemilihan umum, dan juga berupaya untuk mengajarkan atau mentransfer pengetahuan mengenai pendidikan politik khususnya dalam hal berkampanye kepada para praktisi kampanye yang berada di luar negara Amerika Serikat (AS).

Pada kenyataannya dengan adanya penerapan sistem pemilihan umum, presiden dan wakil presiden yang terpilih merupakan pasangan calon presiden yang mendapatkan atau memperoleh suara terbanyak memungkinkan bagi siapapun calon presiden untuk mendapatkan kesempatan dalam memenangkan pemilihan umum yang sedang berlangsung. Hal inilah yang akhirnya mengakibatkan adanya kontestasi antar peserta calon presiden menjadi sangat kompetitif, baik antara para peserta calon presiden dengan partai politik atau parpol yang berbeda. Oleh karena itu, menurut Assidiq & Triguswinri (2021) pemilihan calon presiden atau pemilihan presiden tidak lagi dianggap merepresentasikan pertarungan ideologi antar partai politik atau parpol (lemahnya identitas kepartaian) melainkan pertarungan kemampuan personal antar para peserta calon presiden atau kandidatnya (*candidate-centered politic*).

Dalam era politik modern, pidato politik menjadi salah satu alat utama yang digunakan oleh calon presiden untuk mencapai tujuan politik mereka yaitu mempengaruhi persepsi dan keputusan pemilih. Analisis gaya bahasa dan retorika pada pidato politik pemilihan umum 2024 sangat penting karena memainkan peran sentral dalam membentuk citra dan kredibilitas calon presiden di mata pemilih.

Gaya bahasa yang digunakan dapat mencerminkan kepribadian, visi, dan misi calon, serta mempengaruhi bagaimana pemilih memahami dan menilai mereka. Misalnya, penggunaan bahasa yang sederhana dan lugas dapat membuat pesan lebih mudah dipahami dan diakses oleh audiens yang lebih luas, sementara retorika yang emosional dapat menyentuh perasaan dan membangkitkan semangat pemilih. Seperti yang diungkapkan oleh Sujoko & Haboddin (2022) retorika yang efektif dapat menciptakan resonansi emosional yang mendalam, yang esensial dalam kampanye politik modern.

Ariyanto & Mauristha (2021) menyampaikan bahwa gaya bahasa dan retorika yang digunakan oleh pemimpin politik dalam pidato mereka dapat mempengaruhi persepsi dan keputusan pemilih. Sebagai contoh, dalam sebuah penelitian yang mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pemilih pada pemilihan kepala daerah, ditemukan bahwa kredibilitas kandidat, termasuk kompetensi individu, niat baik, dan kejujuran dalam berpolitik, merupakan hal yang sangat penting dalam mempengaruhi persepsi pemilih dan keputusan mereka.

Gaya bahasa dan retorika dalam komunikasi politik yang digunakan oleh para calon presiden untuk menyampaikan pesan secara terus menerus pada saat debat maupun pidato terbuka menjadi salah satu fungsi persuasif para calon presiden. Hal ini pun selaras dengan apa yang disampaikan oleh Van Dijk (1997) bahwa gaya bahasa dan retorika dalam pidato politik memiliki fungsi persuasif yang signifikan dalam konteks komunikasi politik, di mana kehadirannya sering kali memiliki fungsi persuasif dan signifikansi politik. Hartinah & Kindi (2020) mengungkapkan bahwa gaya bahasa dan retorika dalam pidato politik juga dapat

memberikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana pemimpin politik menyampaikan pesan mereka, mempengaruhi opini publik, dan memahami proses pembuatan kebijakan. Menurut Hartinah & Kindi (2020) penelitian tentang *diction* dan gaya bahasa pada pidato politik telah memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana pemilihan kata dan gaya bahasa dapat mempengaruhi efektivitas komunikasi politik.

Pada saat ajang pemilihan umum 2024, komunikasi politik menjadi suatu proses penyampaian informasi atau sebuah pesan yang menggambarkan lambang, symbol, atau kegiatan yang bersifat politik dengan tujuan untuk membuka wawasan dan cara berpikir, serta dapat mempengaruhi sikap atau tingkah laku khalayak yang menjadi audiens dari target politiknya. Komunikasi politik dapat membentuk strategi-strategi yang digunakan untuk mendapat simpati dari masyarakat maka dari itu para calon presiden dan juga peserta pemilihan umum menghimbau masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi dalam pemilihan umum yang dilaksanakan. Supaya hal yang membentuk tujuan dapat tercapai, maka penyusunan strategi-strategi komunikasi politik yang tepat sangat diperlukan. Strategi-strategi komunikasi politik merupakan strategi-strategi yang memiliki pengaruh yang penting dalam ajang politik, karena jika strategi-strategi komunikasi yang digunakan tepat pasti target yang dituju sesuai dengan harapan. Penelitian mengenai strategi-strategi komunikasi politik dan peran media ini memiliki tujuan untuk mengkaji hubungan antara kemenangan presiden, komunikasi, pengaruh media, dan juga masyarakat, khususnya pengaruh kampanye dalam pemilihan umum presiden.

Pidato para calon presiden merupakan salah satu cara untuk para calon presiden merepresentasikan visi, misi, program dan citra para calon maupun partai politik nya. Pidato para calon presiden tentunya memiliki peranan penting sebagai kunci dalam komunikasi politik yang dapat mempengaruhi bagaimana cara pesan disampaikan agar informasi dapat dipahami serta tujuan dicapai. Pada saat para calon presiden berpidato, bahasa bukan lagi hanya sekedar medium dalam berkomunikasi, tetapi juga sebagai salah satu instrumen kekuasaan yang biasanya digunakan oleh para calon presiden untuk mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap para calon presiden. Hal ini didukung oleh Alnosairee & Sartini (2015) di mana kesadaran akan prinsip bahwa bahasa dapat membentuk pemahaman dan pandangan masyarakat menjadi krusial untuk memahami kompleksitas wacana politik. Konsep bahasa dalam wacana politik bukan hanya sarana komunikasi konvensional, tetapi juga tindakan untuk mempengaruhi, memberikan implikasi yang mendalam. Fauzi (2022) menyatakan bahwa dalam pidato-pidato calon presiden, pemilihan kata tidak semata-mata mengandung makna konvensional, melainkan memiliki daya ungkit kekuasaan yang dapat membentuk opini dan mempengaruhi perilaku masyarakat. Gaya berbicara dan strategi retorika pada saat pidato politik para calon presiden menjadi elemen strategis yang digunakan untuk membujuk dan meyakinkan, memperkuat wacana politik, dan pada gilirannya, mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam proses pemilihan presiden 2024. Menurut Yulianto dan Abrian (2023) pidato kampanye calon presiden menjadi titik puncak ekspresi wacana politik identitas. Saat calon presiden berbicara atau menyampaikan visi misinya, mereka tidak hanya menyampaikan ide atau gagasan,

tetapi juga secara sengaja membentuk naratif identitas yang dapat meresap ke dalam pikiran masyarakat.

Pemilihan umum presiden 2004 merupakan pemilihan umum pertama yang presidennya dipilih langsung oleh rakyat. Penerapan peraturan ini terjadi setelah amandemen UUD 1945. Indonesia menganut sistem demokrasi Pancasila yang artinya Pancasila sebagai sistem pemerintahan yang merujuk pada nilai-nilai Pancasila. Demokrasi Pancasila disebutkan pada pembukaan UUD 1945 yang memuat ideologi dasar bangsa dan negara Indonesia dalam sistem demokrasi yang memiliki ciri melibatkan masyarakat dalam menjalankan pemerintahan. Indonesia menerapkan sistem demokrasi dalam pemilihan umum dengan pelaksanaan pemilihan umum secara langsung. Sistem demokrasi tentunya sangat menjunjung tinggi nilai kebebasan, partisipasi rakyat, persamaan, dan setiap warga negara dapat ikut serta berpartisipasi dan mendapat hak yang sama dalam demokrasi. Sistem demokrasi melibatkan warga negara atau masyarakat dalam pengambilan keputusan kebijakan hingga penetapan kebijakan. Menurut Holmberg & Alvinus (2020) konsep “Kerakyatan” dalam wacana politik sangat penting dalam membentuk hubungan antara pemimpin dan masyarakat, yang mencerminkan esensi demokrasi dan dedikasi para kandidat untuk mengadvokasi kepentingan masyarakat yang lebih luas. Hal ini pun didukung oleh Alekseyeva (2021) dengan menekankan “kerakyatan”, tokoh politik menunjukkan komitmen mereka untuk memahami dan memperjuangkan kebutuhan masyarakat yang ingin mereka wakili, sehingga memperkuat legitimasi dan otoritas mereka sebagai pemimpin yang diakui dan dihormati oleh masyarakat.

Dari segi objek, penelitian ini fokus pada pidato dan debat terbuka yang disampaikan oleh para calon presiden pada Pemilihan Presiden 2024 di Indonesia. Pemilihan presiden adalah konteks politik yang penting dan mempengaruhi arah kebijakan negara untuk periode lima tahun ke depan. penelitian ini memilih objek yang aktual dan relevan, mengingat pentingnya pidato politik dalam membentuk opini publik dan mempengaruhi hasil pemilihan. Dari segi tema, penelitian ini memusatkan perhatian pada makna kerakyatan dalam pidato dan debat Calon Presiden. Berdasarkan penjelasan di atas dapat dilihat bahwa makna kerakyatan yang ada dan diutarakan oleh ketiga calon presiden pada pemilihan umum 2024 ini memiliki konsep, perspektif, makna dan signifikansi yang berbeda-beda. Hal inilah yang akhirnya menjadi daya tarik bagi peneliti untuk melihat bagaimana makna kerakyatan dari para calon presiden di dalam pidato Pemilihan Presiden 2024, khususnya pada studi pada debat dan pidato terbuka.

1.2 Identifikasi Masalah

Konsep kerakyatan memainkan peran penting dalam pemilihan presiden di Indonesia, yang mencerminkan dedikasi para kandidat untuk mengadvokasi kepentingan masyarakat luas. Kerakyatan berfokus pada upaya memastikan bahwa kebijakan pemerintah benar-benar bermanfaat dan meningkatkan kehidupan masyarakat umum, bukan hanya segelintir orang yang memiliki hak istimewa. Setiap kandidat presiden melakukan pendekatan kerakyatan secara berbeda, menunjukkan prioritas dan strategi yang beragam untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seperti yang diutarakan oleh para kandidat calon presiden.

Berdasarkan penjabaran diatas, peneliti menemukan beberapa perbedaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian terdahulu. Penelitian yang sudah dilakukan oleh Naxera (2023) dengan judul “*Let us blow them down!: Corruption as the subject of (non-)populist communication of the Czech Pirate Party*” tidak membahas mengenai makna kerakyatan dari para calon presiden di dalam pidato Pemilihan Presiden, khususnya pada studi pada debat dan pidato terbuka, melainkan menggunakan analisis konten dan *principle of triplets* untuk menunjukkan bahwa partai di Ceko tidak mengadopsi prinsip makna kerakyatan pada debat dan pidato terbuka yang dilakukan.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Rensmann et al. (2017) dengan judul “*Editorial to the Issue on Populism and the Remaking of (Il)Liberal Democracy in Europe*” tidak membahas mengenai makna kerakyatan dari para calon presiden di dalam pidato Pemilihan Presiden, khususnya pada studi pada debat dan pidato terbuka, melainkan memanfaatkan konseptualisasi teoritis dan penelitian empiris komparatif, menyimpulkan bahwa kerakyatan dapat memiliki dampak positif maupun negatif terhadap demokrasi.

Penelitian yang dilakukan oleh Magdy & Al Saoud (2020) dengan judul “*Political Contagion and Electoral Populism: Content Analysis of Campaign speeches in United Kingdom and United State*” tidak membahas mengenai makna kerakyatan dari para calon presiden di dalam pidato Pemilihan Presiden, khususnya pada studi pada debat dan pidato terbuka, melainkan menggunakan analisis konten kuantitatif dan *purposive sampling*, yang menunjukkan bahwa politisi utama

mengadopsi gaya komunikasi kerakyatan yang berkorelasi dengan keberhasilan elektoral.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Robinson & Milne (2017) dengan judul “*Populism and political development in hybrid regimes: Russia and the development of official populism*” tidak membahas mengenai makna kerakyatan melainkan menggunakan analisis retorika terhadap kerakyatan, yang menemukan bahwa kerakyatan digunakan sebagai alat stabilisasi rezim dengan mendefinisikan ulang hubungan antara negara dan masyarakat.

Pada penelitian yang akan dilakukan saat ini, memiliki beberapa aspek kebaruan dibandingkan dengan keempat penelitian terdahulu. Dimulai dari segi empiris, penelitian ini berfokus pada konteks spesifik makna kerakyatan dari para calon presiden di dalam pidato Pemilihan Presiden, khususnya pada studi pada debat dan pidato terbuka 2024 di Indonesia, memberikan perspektif kontemporer yang sangat relevan. Selain itu, penelitian ini mengkaji pidato dan debat calon presiden dalam konteks pemilihan umum yang sangat terkini, berbeda dengan studi sebelumnya yang cenderung meneliti pada debat pemilihan umum Pemilihan Presiden yang sudah berlalu di negara-negara Eropa dan Amerika Serikat.

Melalui lensa Interaksionisme Simbolik, konsep kerakyatan tidak hanya sekadar proyeksi dari para kandidat presiden, tetapi juga dipahami dan dimaknai oleh publik dalam ranah komunikasi politik dan interaksi sosial. Dinamika ini mencerminkan hubungan yang rumit antara pemimpin politik dan khalayak dalam membangun pemahaman bersama mengenai tujuan dan nilai yang ingin dicapai dalam kepemimpinan politik (Hendriks, and Lees-Marshment, 2018). Penggunaan

simbol-simbol seperti kesetaraan, keadilan sosial, dan kedaulatan rakyat oleh para kandidat beresonansi dengan publik sebagai komitmen terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan kesejahteraan sosial, sehingga memperkuat ikatan antara para pemimpin dan pemilih (Kirgil, 2023).

Selain itu, penggunaan simbolisme kerakyatan secara strategis oleh para kandidat presiden berfungsi untuk membangkitkan hubungan emosional dan ideologis dengan masyarakat, menumbuhkan rasa memiliki nilai dan aspirasi yang sama. Dengan menyoroti nilai-nilai inti seperti kesetaraan, keadilan sosial, dan kedaulatan rakyat, para kandidat menandakan dedikasi mereka terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan kesejahteraan masyarakat, yang beresonansi dengan publik sebagai komitmen yang teguh terhadap cita-cita tersebut (Broockman & Skovron, 2018). Keselarasan nilai antara pemimpin dan warga negara sangat penting dalam membangun kepercayaan, legitimasi, dan dukungan untuk agenda politik kandidat, karena hal ini menandakan adanya visi bersama untuk masa depan bangsa.

Dalam konteks komunikasi politik, representasi simbolik dari kerakyatan memainkan peran penting dalam membentuk narasi kepemimpinan dan pemerintahan. Dengan menekankan nilai-nilai seperti kesetaraan, keadilan sosial, dan kedaulatan rakyat, para kandidat presiden memposisikan diri mereka sebagai pejuang prinsip-prinsip demokrasi dan advokat untuk kesejahteraan masyarakat (Seijts, Clercy, & Miller, 2022). Penggunaan simbol-simbol strategis ini tidak hanya menyampaikan rasa inklusivitas dan representasi, tetapi juga menggarisbawahi pentingnya keterlibatan dan partisipasi warga negara dalam proses politik, sehingga memperkuat komitmen kandidat terhadap kepemimpinan

yang efektif dan responsif. Dalam menganalisis isi terkait makna kerakyatan dalam pidato calon presiden, teori Interaksi Simbolik menjadi landasan yang relevan. Dalam pendekatan ini, peneliti akan menyoroti penggunaan simbol-simbol yang digunakan oleh calon presiden dalam pidatonya untuk mengekspresikan dan menyampaikan makna kerakyatan (Martin, 2023).

Lebih lanjut, Teori Interaksionisme Simbolik menggarisbawahi pentingnya interaksi antara pemimpin politik dan masyarakat dalam membangun makna dan interpretasi bersama tentang kerakyatan dalam lanskap politik (Broockman & Skovron, 2018). Dengan terlibat dalam interaksi simbolis yang menyoroti nilai-nilai seperti kesetaraan, keadilan sosial, dan kedaulatan rakyat, para kandidat bertujuan untuk membangun pemahaman yang sama dengan para pemilih mengenai tujuan dan prinsip-prinsip yang memandu kepemimpinan politik mereka. Ini termasuk analisis kata-kata, frase, lambang, dan bahasa tubuh yang digunakan dalam pidato tersebut. Selain itu, teori ini juga menekankan pentingnya interaksi simbolik antara calon presiden dan audiensnya (Rahmawati, 2023). Peneliti akan melihat bagaimana calon presiden menggunakan bahasa, gaya berbicara, dan retorika untuk mempengaruhi persepsi, sikap, dan tindakan audiens terkait dengan konsep kerakyatan. Selain itu, melalui teori Interaksi Simbolik, analisis konstruksi identitas politik juga akan dilakukan. Ini mencakup bagaimana calon presiden membangun citra diri yang terkait dengan kerakyatan, serta bagaimana citra ini dipengaruhi oleh interaksi simbolik antara calon presiden dan audiens. Dengan demikian, teori Interaksi Simbolik memberikan kerangka kerja yang kuat untuk memahami

bagaimana makna kerakyatan disampaikan, dipahami, dan diinterpretasikan dalam pidato politik calon presiden.

Dari sisi metodologis, penelitian ini menggunakan analisis isi pada pidato dan debat, menawarkan pendekatan sistematis untuk memahami makna kerakyatan. Pendekatan simbolik-interaksionis yang digunakan juga merupakan kontribusi metodologis baru, menggabungkan elemen sosio-psikologis dalam analisis politik. Pendekatan ini berbeda dengan beberapa studi sebelumnya yang lebih banyak menggunakan analisis retorika. Penggunaan teori interaksi simbolik seperti pikiran (*mind*), diri (*self*) dan masyarakat (*society*) dalam penelitian ini juga dapat dikaitkan kepada cara ketiga calon kandidat presiden dalam Pemilihan Presiden 2024 agar dapat menambah dimensi baru dalam analisis komunikasi politik yang belum banyak dieksplorasi dalam penelitian kerakyatan. Hal ini pun di dukung oleh Ranubaya & Yohanes (2023) yang mengatakan bahwa interaksi antar individu atau pemimpin kepada masyarakat akan selalu mengalami perkembangan yang dapat dilihat melalui tubuh antara lain suara, vocal, gerakan fisik dan ekspresi tubuh yang dilakukan secara sadar.

Selain itu, dari segi teori, penelitian ini memperkenalkan pendekatan simbolik-interaksionis untuk menganalisis makna kerakyatan dalam pidato, memberikan kontribusi teoretis baru yang menekankan bagaimana simbol dan interaksi membentuk persepsi publik. Fokus pada pemahaman mendalam tentang makna kerakyatan dari sudut pandang simbolik memberikan perspektif baru dalam kajian kerakyatan, memperluas batasan teori yang selama ini lebih banyak berpusat pada analisis diskursif dan politik tradisional. Selain itu, konteks pembahasan yang

lebih spesifik di Indonesia yang digunakan dalam penelitian ini juga dapat memberikan kontribusi unik dengan dinamika politik dan budaya yang ada di Indonesia, yang di mana tentunya memiliki dinamika politik dan budaya yang berbeda dari negara-negara Eropa dan Amerika Serikat agar dapat menawarkan wawasan yang lebih luas dan mendalam mengenai fenomena makna kerakyatan secara global di Indonesia.

Menurut Fossati & Coma (2020) di Indonesia, individu-individu dari berbagai golongan baik Islamis dan nasionalis cenderung mendukung redistribusi ekonomi dan otonomi daerah, yang menghadirkan pandangan alternatif tentang demokrasi dan preferensi kebijakan. Sependapat dengan hal tersebut, Ahlstrand (2021) menyatakan bahwa tokoh-tokoh berpengaruh seperti yang dulu menjadi calon presiden seperti Megawati Soekarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono memainkan peran penting dalam mengamankan dukungan untuk pencalonan presiden dengan mengusung konsep kerakyatan yang kemudian membentuk lanskap politik dan diimplementasikan kedalam program kerjanya.

Widian et al. (2023) mengungkapkan bahwa sejak era reformasi terdapat tiga (3) penggunaan narasi politik yang sering digunakan diantaranya agama, kerakyatan, dan latar kecocokan pasangan sipil-militer, walaupun narasi yang terakhir sejak tahun 2014 sudah jarang dipakai. Hal ini tentunya di dukung oleh Aminulloh et al. (2022) yang menyatakan bahwa alat komunikasi politik seperti debat, kampanye terbuka, *meme* politik dan propaganda di media sosial yang mengangkat isu-isu kerakyatan dan agama diakui sebagai taktik yang digunakan untuk mempengaruhi opini publik dan menggalang dukungan selama pemilihan

umum presiden. Sependapat dengan hal yang diutarakan tersebut Lee (2020) berbicara bahwa adu gagasan dan perang komentar antara pemilih terkait visi-misi calon presiden dengan tema kerakyatan terus dilakukan dalam membentuk persepsi publik.

Holmberg & Alvinus (2020) menyatakan bahwa konsep “Kerakyatan” dalam wacana politik sangat penting dalam membentuk hubungan antara pemimpin dan masyarakat, yang mencerminkan esensi demokrasi dan dedikasi para kandidat untuk mengadvokasi kepentingan masyarakat yang lebih luas. Hal ini didukung oleh pendapat Alekseyeva (2021) yang menyatakan dengan menekankan “kerakyatan”, tokoh politik menunjukkan komitmen mereka untuk memahami dan memperjuangkan kebutuhan masyarakat yang ingin mereka wakili, sehingga memperkuat legitimasi dan otoritas mereka sebagai pemimpin yang diakui dan dihormati oleh masyarakat. Holmberg & Alvinus (2020) pun mengutarakan bahwa didalam ranah kontestasi politik, pemilihan tema “Kerakyatan” dipengaruhi oleh dua faktor utama. Pertama, konteks politik yang mengharuskan partisipasi dan keterwakilan rakyat dalam proses pengambilan keputusan, menggarisbawahi pentingnya pemimpin yang dipilih oleh rakyat untuk menyuarakan kepentingan mereka. Kedua, fokus pada “Kerakyatan” menyoroti aspek legitimasi dan otoritas, karena para kandidat memosisikan diri mereka sebagai pemimpin yang terhubung secara emosional dan ideologis dengan rakyat, sehingga memperkuat posisi mereka sebagai figur yang dihormati dan diakui di dalam masyarakat (Kristina et al., 2021)).

Penekanan pada tema “Kerakyatan” dalam wacana politik sejalan dengan literatur analisis wacana yang lebih luas yang mengeksplorasi bagaimana ideologi politik dibingkai, didiskusikan, dan dinegosiasikan melalui pidato dan unjuk rasa (Filipi & Wittig, 2022). Analisis semacam itu mempelajari cara-cara tokoh politik menggunakan wacana untuk menyampaikan keyakinan dan gagasan mereka dalam konteks ideologi tertentu, yang bertujuan untuk membangun dan memperkuat posisi kekuasaan dan pengaruh mereka Alekseyeva (2021). Selain itu, studi tentang pidato politik menawarkan wawasan yang berharga tentang bagaimana para pemimpin membentuk citra mereka dan menyampaikan pendirian mereka dalam berbagai isu, yang berkontribusi pada pemahaman tentang bagaimana representasi politik dibangun dan dipertahankan (Kristina et al., 2021). Melalui komunikasi verbal, para pemimpin dapat membangun citra mereka sebagai sosok yang mengedepankan solidaritas, sadar akan tantangan global, dan secara aktif mempromosikan peran positif di panggung global (Kristina et al., 2021).

Sebagai kesimpulan, tema “Kerakyatan” dalam wacana politik menjadi landasan bagi para kandidat untuk terhubung dengan masyarakat, menunjukkan komitmen mereka terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan kerakyatan, serta memperkuat posisi otoritas dan legitimasi mereka dalam lanskap politik. Dengan menekankan pentingnya mewakili kepentingan rakyat, para pemimpin dapat membangun ikatan emosional dan ideologis yang kuat dengan rakyat, memperkuat peran mereka sebagai tokoh yang dihormati dan diakui di masyarakat. Seperti yang disampaikan oleh Holmberg & Alvinus (2020) sebelumnya yang menyatakan bahwa konsep “Kerakyatan” sangat penting dalam membentuk hubungan antara

seorang pemimpin dengan rakyatnya. Hal ini pun didukung oleh Alekseyeva (2021) yang menyatakan dengan menekankan “kerakyatan”, seorang tokoh politik atau pemimpin dapat menunjukkan komitmen mereka untuk memahami dan memperjuangkan kebutuhan masyarakat yang ingin mereka wakili, sehingga memperkuat otoritas mereka sebagai seorang pemimpin diakui dan dihormati oleh masyarakat.

Dalam pidato politik Pesan yang terkandung dalam makna kerakyatan dalam pidato politik yang digunakan dalam kampanye tidak hanya merupakan sekedar retorika, tetapi juga dapat menjadi tolok ukur atau acuan dari ide kebangsaan serta gagasan terkait tujuan bernegara yang direalisasikan melalui program kerja. Retorika kerakyatan sering kali menekankan hubungan antara pemerintah dan masyarakat, menyoroti partisipasi aktif, keterlibatan, dan pelayanan kepada masyarakat (Kaltwasser & Hawkins, 2021). Ketika kandidat politik menekankan gagasan kerakyatan dalam kampanye mereka, hal ini mencerminkan komitmen mereka terhadap prinsip-prinsip nasional yang memprioritaskan pelayanan dan kesejahteraan rakyat.

Dalam penyampaian konsep kerakyatan, calon presiden memasukkannya dalam unsur utama di dalam pidato politiknya. Konsep tersebut sering kali mencerminkan visi dan misi kandidat presiden mengenai bagaimana negara harus diatur dan bagaimana kepentingan dan kebutuhan rakyat harus diprioritaskan (Kaltwasser & Hawkins, 2021). Misalnya, tema-tema seperti pemberdayaan masyarakat, peningkatan akses terhadap layanan publik, perlindungan hak asasi manusia, dan advokasi untuk keadilan sosial biasanya dikaitkan dengan konsep

kerakyatan dalam pidato politik. Selain itu, penggunaan wacana kerakyatan tidak terbatas pada partai politik tertentu, tetapi juga digunakan oleh para pemimpin di seluruh spektrum politik dalam berbagai tingkatan (Nyenhuis, 2020). Hal ini mengindikasikan bahwa retorika kerakyatan merupakan alat yang lazim digunakan oleh tokoh-tokoh politik besar untuk berhubungan dengan pemilih dan menyampaikan komitmen mereka untuk mengatasi masalah-masalah yang menjadi perhatian masyarakat. Dengan demikian, pemilihan tema "Makna Kerakyatan" menjadi penting dalam pidato dan debat politik karena mencerminkan dinamika penting antara pemerintah dan rakyat dalam konteks demokrasi, serta memiliki dampak yang signifikan pada legitimasi dan dukungan politik.

Penelitian ini akan dibatasi pada periode kampanye pemilihan umum 2024 di Indonesia khususnya pada saat debat presiden dan kampanye terbuka. Periode ini mencakup masa kampanye resmi yang dimulai beberapa bulan sebelum hari pemilihan dan berakhir pada hari pemilihan itu sendiri. Pembatasan waktu ini penting untuk memastikan bahwa analisis isi terkait makna kerakyatan tergalil dengan baik. Adapun peneliti akan mengambil waktu penelitian pada saat debat Pemilihan Presiden 2024 yang diselenggarakan KPU menggelar debat Pemilihan Presiden sebanyak lima kali dengan tanggal dan tema yang berbeda-beda. Namun peneliti hanya akan mengambil sesi debat Calon Presiden saja yakni pada; debat pertama (Calon Presiden) pada tanggal 12 Desember 2023 dengan tema "Pemerintahan, Hukum, HAM, Pemberantasan Korupsi, Penguatan Demokrasi, Peningkatan Layanan Publik dan Kerukunan Warga". debat ketiga (Calon Presiden) pada 7 Januari 2024 dengan tema "Pertahanan, Keamanan, Hubungan Internasional

dan Geopolitik”, debat kelima (Calon Presiden) pada tanggal 4 Februari 2024 dengan tema “Kesejahteraan Sosial, Kebudayaan, Pendidikan, Teknologi Informasi, Kesehatan, Ketenagakerjaan, Sumber Daya Manusia, dan Inklusi”, serta dua video kampanye dari masing-masing calon kandidat presiden Pemilihan Presiden 2024 pada saat kampanye terbuka.

Subjek penelitian adalah debat dan pidato terbuka dari tiga calon presiden utama dalam Pemilihan umum 2024: Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo. Objek penelitian mencakup analisis isi makna kerakyatan yang digunakan dalam pidato-pidato tersebut.



Gambar 1. 1 Tema dan Jadwal Debat dan Pidato Terbuka Calon Presiden
Sumber : www.suarasurabaya.net

1.3 Pertanyaan Penelitian

Beberapa pertanyaan kunci yang ingin dijawab melalui penelitian ini, sebagai berikut:

1. Apa bentuk ekspresi interaksi pada tema kerakyatan oleh masing-masing Calon Presiden dalam debat dan pidato terbuka Pemilihan Presiden 2024?
2. Apa konsep kerakyatan yang dimaknai dan dipresentasikan dalam bentuk tema-tema oleh masing-masing Calon Presiden dalam debat dan pidato terbuka Pemilihan Presiden 2024?
3. Bagaimana para calon presiden menampilkan dan menginteraksikan simbol-simbol untuk membentuk dan menyampaikan makna kerakyatan dalam debat dan pidato terbuka Pemilihan Presiden 2024?

1.4 Tujuan Penelitian

Beberapa tujuan kunci penelitian yang ingin dicapai melalui penelitian ini, sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi dan menganalisis apa bentuk ekspresi interaksi pada tema kerakyatan oleh masing-masing Calon Presiden dalam debat dan pidato terbuka Pemilihan Presiden 2024.
2. Mengidentifikasi dan menganalisis konsep kerakyatan yang dimaknai dan dipresentasikan dalam bentuk tema-tema oleh masing-masing Calon Presiden dalam debat dan pidato terbuka Pemilihan Presiden 2024.
3. Mengidentifikasi dan menganalisis bagaimana para calon presiden menampilkan dan menginteraksikan simbol-simbol untuk membentuk

dan menyampaikan makna kerakyatan dalam debat dan pidato terbuka Pemilihan Presiden 2024.

1.5 Signifikansi Penelitian

1.5.1 Manfaat Akademis

1. **Pemahaman Konstruksi Makna Kerakyatan**

Penelitian ini akan memberikan kontribusi dalam memahami bagaimana konsep kerakyatan dimaknai dan dipresentasikan oleh para calon presiden melalui tema-tema dalam debat dan pidato terbuka Pemilihan Presiden 2024.

2. **Kontribusi terhadap Teori Interaksionisme Simbolik**

Melalui analisis tentang bagaimana simbol-simbol digunakan dalam konteks politik, penelitian ini akan memperkaya literatur tentang teori interaksionisme simbolik, khususnya dalam konteks konstruksi identitas politik dan nilai-nilai sosial.

1.5.2 Manfaat Sosial/Praktis

1. **Strategi Kampanye Politik**

Hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran strategi kampanye bagi kandidat calon presiden dan tim kampanye dalam mengoptimalkan pesan-pesan, visi, serta program kerja pemerintahan dalam kampanye yang dibawakan agar sesuai dengan harapan dan kebutuhan rakyat.

2. **Efektivitas Komunikasi Politik Terhadap Publik**

Penelitian ini juga akan memberikan pandangan yang berguna bagi para analis politik dan praktisi komunikasi dalam memahami efektivitas strategi komunikasi politik dalam menyampaikan makna kerakyatan kepada publik.

